



pantau gambut

NARAHUBUNG:

Iola Abas

+6281263709484

info@pantaugambut.id

TITIK API TERDETEKSI DI PROVINSI PRIORITAS RESTORASI GAMBUT

Memasuki musim kemarau, melalui VIIRS per tanggal 17 Juli 2018, Pantau Gambut mendeteksi 539 titik api di provinsi prioritas restorasi gambut. Walaupun pemerintah nasional dan daerah telah bahu membahu merestorasi gambut dan menyirami titik api, kejadian ini menunjukkan belum maksimalnya upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut. Perbaikan tata kelola lahan menjadi kunci dari solusi jangka panjang bencana tahunan Indonesia.

Provinsi	Jumlah titik panas dengan deteksi sensor VIIRS Resolusi 375 x 375 m
Riau	208
Sumatera Selatan	24
Jambi	31
Kalimantan Barat	155
Kalimantan Selatan	53
Kalimantan Tengah	66
Papua & Papua Barat	2
TOTAL	539

Berikut adalah pernyataan dari para Ketua Simpul Jaringan Pantau Gambut di provinsi prioritas restorasi gambut terkait tingginya titik api di provinsi prioritas gambut.

Anton P. Widjaya, Direktur Walhi Kalimantan Barat

Munculnya titik api di daerah prioritas restorasi gambut menjadi *test case* bagi pemerintah. Walaupun komitmen pencegahan kebakaran dan restorasi lahan gambut telah dilakukan secara masif selama 2 hingga 3 tahun terakhir, tingginya jumlah titik api menunjukkan belum ada dampak atau perbedaan signifikan dari upaya tersebut.

Jika tidak ada rencana tindak pencegahan komprehensif yang disiapkan, maka kita akan kembali ke tahun-tahun sebelumnya, di mana prioritas kerja hanya di *tingkat emergency*



pantau gambut

response, yaitu bahu membahu memadamkan api, menyatakan kondisi darurat agar APBD/APBN dapat digunakan sebagai agenda utama menghadapi bencana kebakaran.

Kisworo Dwi Cahyono, Direktur Walhi Kalimantan Selatan

Peristiwa karhutla yang terjadi di tahun 2015 harus menjadi sejarah yang sangat penting. Di tahun ini, kita kembali mengajak publik untuk tidak lupa atas tragedi yang telah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

Oleh sebab itu, kita jangan sampai terlena di tengah tahun politik ini. Apalagi, para pakar memprediksi bahwa tahun-tahun mendatang Indonesia berpotensi mengalami kemarau panjang. Hal ini bisa terlihat bahwa titik api mulai meningkat sekarang. Mari kita ingatkan pemerintah terhadap komitmennya dalam penanganan karhutla, menelaah ulang perizinan, penegakan hukum terutama terhadap perusahaan, pemulihan, dan pengakuan wilayah kelola rakyat serta menghormati dan mengakomodir kearifan lokal.

Feri Irawan, Direktur Perkumpulan Hijau, Jambi

Terkait titik api yang ada, sebaiknya pemerintah daerah tidak tidur dan terlena karena selama ini kita terbantu oleh hujan. Tanpa program pencegahan yang menyeluruh, titik panas langsung bertebaran di musim kemarau. Tim Restorasi Gambut Daerah Jambi harus segera bekerja dan melibatkan semua pihak untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran.

M. Hairul Sobri, Direktur Walhi Sumatera Selatan

Substansi penyelesaian karhutla belum disentuh pemerintah, karena lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan. Pola pikir pemerintah yang masih menyalahkan masyarakat lokal sebagai pelaku kebakaran merupakan pola pikir yang kuno atau jalan ditempat. Buktinya, walaupun anggaran yang disiapkan sangat besar dengan alasan agar kabut asap karhutla tidak mengganggu jalannya Asian Games, masih terdapat titik api di Sumatera Selatan.

Sebagian besar pengawasan karhutla harusnya diarahkan ke perusahaan yang rakus ruang karena selama ini kebanyakan titik api berada di atas lahan gambut di dalam konsesi perusahaan. Harapan kami di Sumatera Selatan agar penanggulangan bencana karhutla dapat juga berlangsung pasca Asian Games.

Romes Irawan Putra, Direktur Kaliptra Andalas

Penyelesaian akar permasalahan karhutla harus menjadi prioritas bagi pemerintah pusat, daerah, hingga desa. Gubernur Riau terpilih seharusnya menjadikan perbaikan sistem dan regulasi tata kelola hutan dan lahan, khususnya lahan gambut di dalam konsesi perusahaan, sebagai agenda utama mereka.



pantau gambut

Yohanes Akwan, Jaringan Masyarakat Gambut Papua

Hutan Gambut Papua ibarat anak terlantar yang tidak diurus oleh orang tuanya, tidak berdaya didesak oleh mereka yang rakus memanfaatkan lahan untuk kepentingan lain dengan dalil kebijakan ekonomi, kemudian mendesak si anak mati agar leluasa memanfaatkan lahannya. Orang tuanya mengaku pada para raja bahwa anak tersebut tetap mereka rawat agar kelak menjadi orang yang berguna, namun fakta tidak sesuai kenyataan hari ini. Anak tersebut tidak berdaya dan akhirnya hidup terlantar dan tidak bahagia.

Selama pemerintah daerah belum memperbaiki tata kelola lahan dengan baik dan memperhatikan unsur keberlanjutan ekosistem gambut terkait urgensi ekologi, maka Papua yang digadangkan penting untuk Indonesia hanya akan menjadi cerita kosong, di mana kehancuran struktural di segala dimensi kehidupan akan muncul sebagai akibat tidak adanya komitmen penyelenggara untuk mewujudkannya.

Tentang Pantau Gambut:

Pantau Gambut merupakan sebuah inisiatif independen dari berbagai lembaga swadaya masyarakat di Indonesia yang memanfaatkan teknologi, kolaborasi data, dan jaringan masyarakat untuk memberikan informasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam memastikan keberhasilan komitmen restorasi ekosistem gambut yang dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan di Indonesia.

Pantaugambut.id memiliki fitur Pantau Komitmen, Peta Aktivitas Restorasi, Berbagi Cerita, dan Pelajari. Platform pantaugambut.id dapat diakses oleh siapapun secara gratis.